

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota-kota pesisir terus mengalami urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan penduduk di seluruh dunia, terkait dengan beragam manfaat ekonomi dan sosial yang mengalir dari kedekatannya dengan laut (Pittman *et al.*, 2019). Kondisi tersebut juga terjadi pada Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, negara maritim, negara yang mempunyai kekayaan laut yang begitu melimpah. Tidak heran jika kawasan pesisir di Indonesia menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Diskursus mengenai pengembangan wilayah pesisir merupakan topik yang menarik untuk di diskusikan dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir (Dahuri & Dutton, 2000; Rudyanto, 2004). Kemiskinan wilayah pesisir, bahkan mengakibatkan marjinalisasi secara ekonomi terhadap wilayah pesisir. Tetapi, walaupun termarginalkan secara ekonomi, wilayah pesisir dengan keunggulannya terutama dalam hal industri perikanannya, tidak dapat di anggap remeh dalam

ketahanan pangan, nutrisi, matapencarian, rural development, dan pengentasan kemiskinan (Jentoft & Chuenpagdee, 2015).

Wilayah pesisir dijelaskan secara umum oleh (Beatly et al, 2002) bahwa pesisir adalah wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem udara yang bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan (Darmanto and Suning, 2015). Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan optimalisasi pemanfaatan kawasan wilayah pesisir kurang diperhatikan. Sehingga kondisi saat ini pembangunan wilayah pesisir relatif tertinggal dibandingkan wilayah daratan lainnya (Wakhidah, Dewi and Ristianti, 2014). Masyarakat pesisir (nelayan) relatif lebih miskin dibandingkan masyarakat lainnya. Kondisi ini diperburuk dengan posisi nelayan yang relatif lemah dibandingkan dengan profesi lainnya (Budiharsono, 2001). Sehingga kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui beberapa Dinas-Dinas terkait, untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi kawasan pesisir.

Melalui hak otonomi daerah dalam Undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki tugas dan peran yang besar dalam mengelola potensi wilayah dan mensejahterakan seluruh masyarakat di wilayah pemerintahannya dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikelola sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah (Fadli and Nurlukman, 2018). Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pesisir dan kelautan yang sangat besar. Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112). Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah. Sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Jambi yang dapat diperbaharui antara lainnya

adalah sumberdaya alam yang berasal dari perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar baik untuk pengembangan perikanan tangkap di laut dan di perairan umum, terlebih lagi potensi untuk pengembangan budidaya perikanan, dengan panjang sungai 1.740 kilometer, potensi lahan tambak 18.000 Ha dan potensi lahan marginal 100.700 Ha, Luas Laut 3.879,67 Ha dan Luas Perairan Umum 115.000 Ha, serta potensi kawasan pesisir Provinsi Jambi sebesar ± 261,80 kilometer yang salah satunya dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Garis pantainya yang bersentuhan dengan laut Jawa yang relatif tenang menimbulkan banyak potensi pesisir dan kelautan yang bisa dimanfaatkan.

Tabel 1.1

Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi

Jambi (Persen), 2019-2021

No	Sektor PDRB	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.89	30.89	31.56
2	Pertambangan dan Penggalian	18.48	12.23	14.09
3	Industri Pengolahan	9.81	10.70	10.25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.14	0.15	0.14
6	Konstruksi	7.44	7.96	7.84
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.14	12.64	12.58
8	Transportasi dan Pergudangan	3.24	2.74	2.56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.21	1.18	1.10
10	Informasi dan Komunikasi	3.91	4.43	4.07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.33	2.62	2.56
12	Real Estate	1.63	1.73	1.61

No	Sektor PDRB	Tahun		
		2019	2020	2021
13	Jasa Perusahaan	1.23	1.26	1.21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.83	5.19	4.58
15	Jasa Pendidikan	3.51	3.84	3.49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.19	1.36	1.40
17	Jasa lainnya	0.97	1.00	0.89

Sumber: BPS, Provinsi Jambi 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui tingginya potensi daya tarik wilayah pesisir Provinsi Jambi terdapat pada sektor perikanan dan kelautan. Kemudian dalam menindaklanjuti dan mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan beberapa kebijakan yang strategis. Salah satunya melalui, **Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi Tahun 2019-2039**. Peraturan tersebut secara substansi memiliki tujuan untuk mewujudkan penataan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang serasi,

selaras dan seimbang dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tujuan dan arah kebijakan pengembangan kawasan pesisir tersebut memiliki tujuan jangka panjang, dan memerlukan koordinasi lintas organisasi secara vertikal/horizontal. Kondisi tersebut dapat diidentifikasi pada ruang lingkup Peraturan Gubernur tersebut, diantaranya pada pasal 2 Ayat 2 dan huruf; e. Mitigasi Bencana; f. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi; h. Hak, Kewajiban, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan; i. Pemberdayaan Masyarakat, memerlukan kerjasama antar *stakeholder* yang masif. Sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan sangat diperlukan kerjasama antar sektor.

Keberhasilan pemanfaatan pengembangan dan pembangunan di wilayah kawasan pesisir pantai Provinsi Jambi, dalam kajian ini lebih fokus dilihat dalam relasi antar keterlibatan aktor. Secara sosial, jejaring pengembang kawasan pesisir dapat menghubungkan individu dan organisasi untuk

mempromosikan kolaborasi dan berbagi informasi dan pengalaman (White et al., 2006a; TNC-CI-WWF-WCS, 2008). Tugas dan fungsi antar aktor memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan prinsip-prinsip sesuai ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Dalam proses yang dijalankan tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Provinsi, sehingga harmonisasi, sinergi program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi harus di jaga dengan tujuan agar hasil perikanan terus meningkat dan masyarakat lebih sejahtera.

Pernyataan terkait dengan pentingnya keterlibatan dan bentuk koordinasi oleh antar pihak, juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi:

“Untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Rapat koordinasi tersebut juga bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi. Rapat koordinasi kerja dilaksanakan agar setiap pelaksanaan program dan kegiatan

dapat terkoordinasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien”

Berdasarkan pernyataan data diatas dapat diketahui untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah kawasan pesisir Provinsi Jambi, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar aktor. Hal tersebut dikarenakan permasalahan dan lokasi yang menjadi ruang lingkup sangat kompleks, selain itu potensi yang ada cukup besar. Potensi tersebut diantaranya adalah terumbu karang, hutan mangrove, serta keanekaragaman *flora* dan *fauna* laut merupakan potensi yang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan, baik di bidang produksi maupun di bidang pariwisata. Saat ini ekosistem pantai terancam kelestariannya terutama oleh kegiatan manusia. Sumber daya pantai merupakan anugerah alam yang sangat berharga bagi mahluk hidup yang perlu dikelola dan dikembangkan secara baik untuk kepentingan saat ini dan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian dan penjelasan terkait dengan konsep pembangunan kawasan pesisir saat ini, serta tantangan dan potensi yang ada sangat kompleks. Peneliti memiliki perhatian pada tatakelola terkait model dan bentuk kerjasama antar *stakeholder*. Kebutuhan akan terkait pembagian fungsi dan peran antar aktor, ini menunjukkan adanya urgensi akan tata kelola yang baik yang terpadu dengan pendekatan *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* menekankan pada kerjasama antar aktor terkait yang titik tekannya ada pada dialog serta sustainabilitas koordinasi pemberdayaan. Sehingga penelitian ini akan fokus dan analisis fenomena kondisi dilapangan terkait dengan hubungan relasi antar aktor dalam mendukung kesuksesan pengembangan dan pemanfaatan kawasan wilayah pesisir.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas terkait dengan bentuk dan model tatakelola relasi antar aktor, dalam pemanfaatan dan pengembangan kawasan pesisir Provinsi Jambi. Permasalahan utama adalah melihat bentuk kerjasama dan

pembagian fungsi antar aktor yang terlibat dalam pengembangan kawasan pesisir. Adapun untuk menentukan substansi permasalahan secara substansi dan sistematis, telah ditentukan dalam poin-poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa saja yang terlibat dalam *colaborative governance* pada pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir Provinsi Jambi?
2. Bagaimana keterlibatan masing-masing aktor dalam *colaborative governance* pada pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir Provinsi Jambi

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini disusun untuk memetakan dan menganalisis kondisi kolaborasi antar *stakeholder* di Pemerintah Jambi dalam pengembangan dan pembangunan kawasan pesisir. Keberhasilan pengembangan dan optimalisasi potensi kawasan pesisir di Provinsi Jambi ditentukan pada implementasi program-program yang memiliki visi yang tepat. Selain itu, keterlibatan *stakeholder* dalam melaksanakan berbagai kegiatan program menjadi salah satu aspek penting. Kondisi tersebut berpengaruh pada tatakelola

dan ekektifitas kegiatan yang dihasilkan dan memiliki *output* pada tujuan yang dihasilkan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan fungsi pada setiap aktor/*stakeholder* yang terlibat dan melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 MANFAAT TEORITIS

Kajian penelitian ini diharapkan memiliki substansi dalam pengembangan kajian ilmu kebijakan publik pada ruang lingkup *colaborative governance*. Melalui penelitian ini seara praktek empiris dilapangan akan dikembangkan kondisi teori yang relevan sesuai dengan kondisi perkembangan. Selain itu, secara substansial pada aspek akademis, penelitian ini dapat memberikan gagasan ide normatif yang tepat dalam penggunaan *colaborative governance* pada pengembangan dan pembangunan kawasan pesisir. Terakhir penulis akan melakukan pengembangan teori secara konstruktif melalui hasil analisis dalam bentuk strategi dan rekomendasi yang aplikatif dalam pengembangan *theory*.

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat jambi, serta beberapa *stakeholder* yang terlibat. Penulis berupaya maksimal dalam menghasilkan analisis data yang informatif dan aktual yang dapat menjelaskan fenomena kondisi pembangunan di kawasan pesisir Provinsi Jambi. Kondisi tersebut tentunya secara jelas menjadi bagian penting dalam berkontribusi memberikan rekomendasi terkait pelaksana kebijakan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini secara tidak langsung